

RANCANG BANGUN EKONOMI PENDIDIKAN DALAM INVESTASI PENDIDIKAN ISLAM

Agus Arwani¹
agus.arwani@stain-pekalongan.ac.id

Abstract

Training leads to the productivity of educated labor. Nevertheless, how the big contribution to growth is still the unanswered question accurately. Hence, it is also strange how the comparison between the level of Economics Behind The results of educational investments compared with investments in other sectors. Schooling is the social institution needed to produce educational products and services. Educational outcomes can be categories as consumption and investment.. As consumption, the results are immediately and directly enjoyable, called “outputs”. While as investment, education give benefits indirectly and in the long term continuity, named “outcomes”. Also the results can be differentiated as economic valued outputs and non-economic valued outputs. The first one is outputs which potentially useful to get financial or monetary advantages, as knowledge and skills. While the second one is benefits which cannot be measured as money, like friendship, happiness, etc. The calculation of economical education results carried out by formulas: the earnings differentials, net present value, or internal rate of return, etc. This computation is very important to make a decision or consideration in choosing and continue studying, to explain manpower condition, and to improve education program to meet with manpower demand.

Keywords: Construction, Education, Economic, Investation

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tujuan dari pada pembangunan, karena pembangunan merupakan suatu usaha menjadikan keadaan menjadi

¹ IAIN Pekalongan.

lebih baik dari pada kasaan sebelumnya. Kondisi yang lebih baik ini tidak hanya ditandai oleh adanya pembangunan fisik saja tetapi pembangunan di bidang spiritual merupakan faktor utama dalam memaknai arti pembangunan, untuk itulah peranan pendidikan merupakan faktor utama yang harus kita perhatikan. Pembangunan ekonomi ditandai dengan tingkat kesejahteraan yang makin baik, tingkat pendapatan masyarakat dan secara akumulatif meningkatnya pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi akan ditengarai oleh tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi pula.

Investasi SDM tidak kalah pentingnya dengan modal fisik, pendidikan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi akibat berkembangnya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, ketarampilan, pengetahuan, dan kemampuan individual sehingga dapat bekerja lebih produktif. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial, politik, budaya, dan kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan pendayagunaan iptek untuk peradaban manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan merupakan permasalahan pokok di semua negara.

Masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pendidikan khususnya persekolahan atau madrasah, karena lembaga tersebut menjadi tumpuan utama untuk mendidik anak-anaknya. Peran strategis itu dapat dipahami sebab dalam masyarakat modern, pada umumnya ketersediaan waktu orang tua lebih banyak untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan jaman. Untuk itu pendidikan anak-anak mereka tidak lagi dapat dilakukan secara intensif di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat secara sendiri-sendiri, tetapi lebih banyak diserahkan kepada lembaga pendidikan seperti sistem persekolahan atau madrasah.

Pemahaman "lebih banyak diserahkan ke sekolah atau madrasah" tersebut berimplikasi bahwa meskipun tanggungjawab pendidikan generasi muda diserahkan kepada sekolah, namun keluarga dan masyarakat tetap memiliki tanggungjawab untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu. Tanggungjawab bersama tersebut oleh Downey dapat dipilah menjadi tugas-tugas primer dan sekunder, baik menyangkut dimensi pribadi, kecerdasan, sosial, maupun dimensi produktif.²

B. Pembahasan

1. Konsep Pendidikan

Pendidikan bagi sebagian orang, berarti berusaha membimbing anak untuk menyerupai orang dewasa, sebaliknya bagi Jean Piaget (1896) pendidikan berarti menghasilkan, mencipta, sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh perbandingan dengan penciptaan yang lain.³ Pandangan tersebut memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umunya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ilmu disebut juga pedagogik, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*Pedagogics*". *Pedagogics* sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*pais*" yang artinya anak, dan "*again*" yang artinya membimbing. Poerbakwatja dan Harahap mengemukakan pedagogik mempunyai dua arti yaitu: (1) praktek, cara seseorang mengajar; dan (2) ilmu pengetahuan

² O. Sutisna. *Administrasi Pendidikan. Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. (Bandung: Angkasa, 1989), hal. 15.

³ Soegarda Poerbakwatja. *Ensiklopedia Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1981), hal. 25.

mengenai prinsip-prinsip dan metode mengajar, membimbing, dan mengawasi pelajaran yang disebut juga pendidikan.⁴

Untuk memberi pemahaman akan batasan pendidikan berikut dikemukakan sejumlah batasan pendidikan oleh para ahli yaitu:

- a. Pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan⁵.
- b. Dalam pengertian yang sempit pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan.⁶
- c. Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.⁷
- d. Dalam pengertian yang agak luas pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.⁸

2. Konsep Ekonomi Pendidikan

Ekonomi pendidikan, menurut Woodhall merupakan cabang dari teori ekonomi yang berkembang sangat cepat sejak 1960- an. Awal tahun 1960-an merupakan kemunculan secara formal dari ekonomi pendidikan, yang jauh sebelumnya telah dimulai dengan kajian tentang modal manusia (*human*

⁴ *Ibid*, hal. 254 dan Tim. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976)

⁵ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008)

⁶ Raymond Mc. Leod. *Sistem Informasi Manajemen*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 25.

⁷ Reza Mudyahardjo. *Filsafat Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Rosda, 2001), hal. 6.

⁸ Muhibbin Syah. *Psikologi Belajar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 10.

capital) yang bersifat sporadis seperti yang dilakukan oleh Smith (1776), Strumilin (1924), dan Walsh (1935). Vaizey (1962) juga mengemukakan adanya pakar lain yang menggagas kemunculan ekonomi pendidikan melalui kajian seputar peran pendidikan atau persekolahan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk, seperti yang dilakukan John Stuart Mill (1867) dan Alfred Marshall (1890).⁹

Teori ekonomi pada dasarnya adalah teori pilih memilih untuk memaksimalkan kepuasan berbagai kebutuhan berdasarkan keterbatasan sumberdaya. Oleh karena itu “ekonomi” dapat diartikan sebagai “*the study of choice*”¹⁰ atau “*the study of the production and distribution of all scarce resources*”.¹¹ Untuk itu ekonomi pendidikan berkenaan dengan cara dimana berbagai pilihan ditetapkan untuk mengubah persediaan tersebut, baik oleh individu yang memerlukan pendidikan maupun oleh guru dan lembaga yang menyediakan layanan pendidikan.¹²

Selanjutnya dengan mengacu kepada pengertian ekonomi yang disampaikan oleh Samuelson dan pengertian pendidikan dari *Webster's New World Dictionary*, Cohn mendefinisikan ekonomi pendidikan sebagai:

"....kajian tentang bagaimana orang dan masyarakat, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, mendayagunakan sumberdaya produktif yang langka untuk memproduksi berbagai ragam pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter dan sejenisnya -- khususnya melalui sekolah formal-- dalam waktu tertentu dan

⁹ G. Psacharopoulos (ed). *Economics of Education. Research and Studies*. (New York: Pergamon Press, 1987), hal. 339.

¹⁰ G. Johnes. *The Economics of Education*. (London: The McMillan Press Ltd., 1993), .hal. 35.

¹¹ Elchanan Cohn. *The Economics Of Education*. (Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing, 1979), hal. 57.

¹² S. Sumarsono. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hal. 27.

mendistribusikan produksi tersebut, untuk saat ini dan di masa mendatang, di antara berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat".¹³

Cohn lebih lanjut menegaskan bahwa pada dasarnya fokus perhatian dari ekonomi pendidikan adalah: (1) proses produksi pendidikan, (2) distribusi pendidikan di antara kelompok-kelompok dan individu-individu yang berebut untuk mendapatkan pendidikan tersebut, dan (3) pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa banyak masyarakat (atau individu) harus membayar berbagai aktivitas pendidikan, dan jenis-jenis aktivitas pendidikan manakah yang harus diseleksi.¹⁴ Dari ketiga fokus tersebut, persoalan proses produksi pendidikan sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam karena di satu pihak ketersediaan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi pendidikan sangat terbatas; dan di pihak lain tuntutan permintaan atau kebutuhan terhadap layanan jasa dan produk pendidikan semakin lama semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan demokratisasi politik yang menuntut persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

3. Output dan Outcome Lembaga Pendidikan Islam

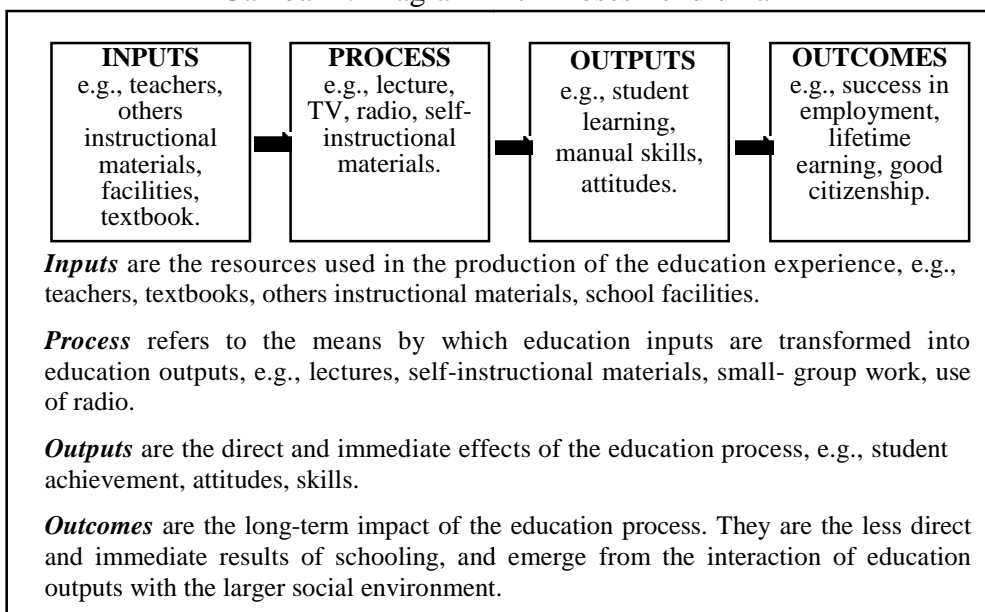
Terminologi "*output*" lembaga pendidikan seringkali disilang-pakai dengan istilah "*outcome*" karena secara leksikal kedua istilah tersebut mempunyai arti yang relatif sama. Menurut Hornby (1987), "*Output*" adalah "*1. quantity of goods, etc., product... 2. power, energy, etc. produced. 3. information produced from a computer*"; dan "*Outcome*" adalah "*effect or result of an event, or of circumstance*". Jadi arti kedua istilah tersebut lebih

¹³ Elchanan Cohn, *Op.Cit*, hal. 1.

¹⁴ *Ibid*, hal. 1-5.

kurang sama dengan "hasil, produksi, atau akibat."¹⁵ Menurut hemat penulis, dalam bidang ekonomi pendidikan, kedua istilah tersebut perlu dibedakan untuk memudahkan menentukan posisi "hasil pendidikan" tersebut di dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh dari suatu proses produksi pendidikan. Untuk itu proses produksi pendidikan tersebut dapat digambarkan sama seperti proses pendidikan yang dikemukakan oleh Chapman sebagai berikut.¹⁶

Gambar 1. Diagram Alur Proses Pendidikan



Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa proses produksi pendidikan selalu menggunakan berbagai sumberdaya yang terbatas. Berkenaan dengan itu diperlukan upaya untuk menggunakan berbagai sumberdaya tersebut secara

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hal. 105.

¹⁶ Chapman, D. *Management and Efficiency in Education. Goals and Strategies*. (Manila-Hongkong: Asian Development Bank and Comparative Education Research Center, The University of Hongkong, 2002), hal. 21.

berdayaguna dan berhasilguna untuk menghasilkan suatu keluaran pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam terminologi ekonomi pendidikan, upaya menghubungkan penggunaan sumberdaya (*input*) secara tepatguna dan berdayaguna di dalam proses produksi untuk menghasilkan keluaran (*output* dan *outcome*) merupakan pemasalahan efisiensi, sebagaimana pernyataan Woodhall m bahwa "*The term 'efficiency' also refers to relationship between the inputs and outputs of a process, and can be applied to the education ...*". Ada berbagai macam jenis efisiensi dalam ekonomi pendidikan. Hanushek membedakan adanya efisiensi ekonomis dan efisiensi teknis, dengan pengertian sebagai berikut:

"Economic efficiency refers to the correct choice of input mix given the prices of inputs (and the production function). Technical efficiency refers to operating on the production frontier, that is, maximizing output for a given set of input".¹⁷

Dengan demikian "*efisiensi ekonomi*" berkenaan dengan pilihan yang tepat dalam mengkombinasikan berbagai input (dengan memilih harga termurah) dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Kombinasi input dapat dilakukan dengan merealokasi penggunaan berbagai sumberdaya yang ada, untuk itu efisiensi ekonomi ini seringkali disebut juga sebagai "*efisiensi alokatif*".¹⁸ Contoh dalam pendidikan misal mengkombinasikan antara penataran guru, penggunaan buku pelajaran, dan komputer atau audio-visual aid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan "*efisiensi teknis*" berkenaan dengan upaya memaksimalkan proses produksi dengan menggunakan teknik dan atau teknologi tertentu. Penggunaan

¹⁷ G. Psacharopoulos. (ed). *Economics of Education. Research and Studies*. (New York: Pergamon Press, 1987), hal. 75.

¹⁸ Johnes, G. *The Economics of Education*. (London: The McMillan Press Ltd, 1993), .hal. 65.

penggunaan *white-board*, OHP, LCD dan *in-focus* merupakan contoh-contoh bentuk efisiensi teknis dalam pendidikan.

Efisiensi juga dapat dilihat dari segi lingkup institusi atau sistem pendidikan, yang mencakup *efisiensi internal* dan *efisiensi eksternal*. Woodhall mengemukakan bahwa efisiensi internal berkenaan dengan hubungan antara input dan output institusi pendidikan (sekolah atau madrasah), atau dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Konsep hubungan ini disebut dengan "efisiensi internal".¹⁹ untuk membedakan dengan konsep "efisiensi eksternal" yang terkait dengan alokasi berbagai sumberdaya untuk kepentingan lain di dalam masyarakat. Sementara itu Depdiknas dalam UU No : 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

"Maksud efisiensi adalah agar sasaran di bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdayaguna dalam arti dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya yang ada seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya".

4. Pengukuran Nilai Ekonomis *Output* dan *Outcome* Pendidikan Islam

Drucker, sebagaimana dikutip Fitz-enz mengklaim bahwa "tantangan terbesar bagi organisasi pada hari ini dan dekade mendatang paling tidak adalah menanggapi perubahan dari era industri ke ekonomi ilmu pengetahuan".²⁰ Implikasinya, setiap organisasi (termasuk lembaga pendidikan Islam) harus dapat secara proaktif menanggapi tantangan tersebut, agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh lembaga pendidikan adalah mempersiapkan dan menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bernilai ekonomis. Dengan demikian pendidikan, apapun jenis dan tingkatnya

¹⁹ Psacharopoulos, G., *Op.Cit.*, hal. 101.

²⁰ J. Fitz-enz. *The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance*. (New York: American Management Association (AMACOM), 2000), hal. 5.

harus dapat memberikan keuntungan ekonomis, baik bagi individu, masyarakat maupun negara.

Individu, masyarakat dan negara telah mempertaruhkan sebagian penghasilan dan atau anggaran untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan Islam. Untuk itu wajar apabila nilai ekonomis dari investasi pendidikan Islam tersebut perlu diidentifikasi dan diukur, baik bagi individu, masyarakat maupun negara. Untuk melakukan berbagai perhitungan pengukuran nilai ekonomis dari keluaran pendidikan Islam tersebut ada baiknya terlebih dahulu mengkaji peta biaya dan keuntungan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Leslie dan Brinkman dalam gambar berikut ini: ²¹

Gambar 2

Kerangka Kerja Biaya-Keuntungan

| | | | | |
|----|----------------------|------------------------|--|-----|
| I | Biaya tidak langsung | Keuntungan Non-moneter | Keuntungan Moneter | III |
| II | Biaya Langsung | | Keuntungan Konsumsi dan Keuntungan Investasi | IV |
| | Biaya Individu | | Keuntungan Individu | |

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa untuk menghitung keuntungan ekonomis diperlukan data tentang biaya tidak langsung (sering disebut juga sebagai *opportunity cost* atau *imputed cost*) dan biaya

²¹ L.L. Leslie dan Brinkman, P.T. *The Economic Value of Higher Education*. (Phoenix: The Oryx Press, 1993), hal. 79.

langsung. Sementara itu keuntungan yang diperoleh dapat berupa keuntungan yang bersifat konsumtif dan keuntungan yang bersifat investatif. Untuk memperkirakan keuntungan ekonomis atau moneter, selanjutnya Leslie dan Brinkman mengajukan tiga cara yakni melalui perhitungan *earnings differentials*, perkiraan *Net Present Value* (NPV), dan perhitungan *private rate of return*. Sedangkan perhitungan *earnings differentials* dilakukan dengan menghitung perbedaan penghasilan antara lulusan jenjang pendidikan tertentu dengan penghasilan dari lulusan jenjang pendidikan lainnya.

Sebagaimana diketahui setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak dapat meningkatkan kemampuan kerja dan penghasilan seseorang, tetapi di pihak lain, menunda penerimaan penghasilan selama mengikuti sekolah tersebut. Selain menunda penerimaan penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar secara langsung uang sekolah, pembelian buku dan alat sekolah, transpor dan sebagainya. Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan penghasilan yang seharusnya diterima tersebut merupakan angka untuk mengurangi penghasilan seumur hidup yang bersangkutan sehingga dapat diperoleh perkiraan NPV.

Selanjutnya untuk menghitung tingkat kembalian individu digunakan ukuran Tingkat Kembalian Internal (*Internal Rate of Return* atau IRR). Dalam hal ini IRR dari melanjutkan sekolah dalam waktu tertentu adalah tingkat discount yang mempersamakan hasil dari melanjutkan sekolah tersebut dengan biaya total. Biaya total untuk melanjutkan sekolah adalah jumlah biaya tidak langsung (*opportunity costs*) dan biaya langsung.

Berbagai perhitungan keuntungan dari keluaran pendidikan seperti di atas, menurut Sumarsono dapat digunakan untuk beberapa hal, antara lain:²²

²² Sumarsono, *Op.Cit.*, hal. 25.

- a. Sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai apakah seseorang akan melanjutkan sekolah atau tidak.
- b. Untuk menerangkan situasi seperti penambahan pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik Indonesia.
- c. Untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga kerja dari masing-masing jenis dan tingkat pendidikan untuk beberapa tahun kedepan.
- d. Untuk menyusun kebijaksanaan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja.
- e. Untuk menentukan apakah suatu program pendidikan tertentu cukup baik untuk diselenggarakan atau tidak, dan pemilihan prioritas dari berbagai alternative program pendidikan yang terbuka.

5. Pendidikan Islam sebagai Investasi

Pendidikan Islam dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan Islam sebagai bagian dari *public service* atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian, kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan.

Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan Islam hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan Islam sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan disegala sektor.

Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan Islam. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan Islam dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat.

Akibatnya alokasi anggaran sektor pendidikanpun biasanya sisa setelah yang lain terlebih dahulu.

Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan Islam dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor.

Konsep pendidikan Islam sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan Islam merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul “*Investment in human capital*” dihadapan *The American Economic Association* merupakan peletak dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi.

Schultz memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan Islam pada saat ini.

Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan *interest* selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari

pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep “revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis”. Para peneliti lainnya seperti Becker dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori *human capital* ini.²³

Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan baik umum maupun Islam dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, pendidikan Islam selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi “*leading sektor*” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan Islam tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan Islam berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

6. Pendidikan Islam Sebagai Investasi Jangka Panjang

Investasi berarti menanamkan sesuatu dalam hal ini modal pada saat sekarang dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang baik di masa yang akan datang, dengan melakukan investasi akan dapat dinikmati hasilnya pada masa yang akan datang. Kegiatan investasi merupakan suatu tindakan suatu tindakan cerdas karena orientasinya jauh ke depan dan bersifat strategis.. Untuk itulah pendidikan memegang peranan penting dengan cara meningkatkan pendidikan diharapkan akan menghasilkan manusia yang berpendidikan yang mampu merencanakan kehidupannya dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki pada berbagai sektor yang akan

²³ Becker G.S. *Human Capital, A theoretical and Empirical Analysis with Special reference to Education*. (Chicago: University of Chicago Press, 1993), hal. 45-144.

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi dirinya maupun lingkungannya. Untuk itulah menempuh pendidikan Islam merupakan suatu tindakan investasi karena diharapkan akan apat meningkatkan taraf hidupnya di kemudian hari.

Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditematkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang.²⁴

Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan seolah terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya ada tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

- a. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan

²⁴ Kompas, 24 Mei 2004.

ketrampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetensi dalam ekonomi yang kompetitif.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan baik umum atau Islam seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang disebabkan karenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan *life skill* dan *broad based education* yang dikembangkan di Indonesia.

- b. Fungsi Non Ekonomi, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial, fungsi kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.²⁵
- c. Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas, kesadaran estetik serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik.

Jelaslah bahwa investasi dalam bidang pendidikan baik umum maupun Islam tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Selama orde baru kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde Baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak

²⁵ Cheng, Yin Cheong. *School Effectiveness and School Based Management: A Mechanism for Development*, (Washington D.C: The Palmer Press, 1996), hal. 7.

lagi melahirkan orang-orang miskin. Artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar.

7. Nilai Balik Pendidikan Islam

Nilai Balik Pendidikan Islam, investasi pendidikan Islam memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan Islam adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan Islam dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan Islam menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan Islam relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% di banding 15% sementara di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9% dibanding 13%.

Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi.²⁶ Pilihan investasi pendidikan Islam juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27%, pendidikan menengah 15% dan pendidikan tinggi 13%.

Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa prioritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (kaya vs miskin).

²⁶ Suryadi. Ace. *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 247.

Artinya siswa PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan criteria *equity* dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan oleh UNESCO. Itulah sebabnya Profesor Kinosita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayati. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun.

8. Nilai Ekonomi Pendidikan Islam

Menurut Ari A. Pradana mengutip pendapat Profesor Joseph Stiglitz, di Jakarta “*Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga*”, kata peraih Nobel Ekonomi. Pertanyaan ini dilontarkan Stiglitz ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti apa yang diperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini adalah salah satu blunder kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia.²⁷

Peranan pendidikan bahasa teknisnya modal manusia (*human capital*) dalam pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Dikemukakan oleh Ari A. Pradana menegaskan pendapat dari Lucas (1990) serta Mankiw, Romer, dan Weil (1992) yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow (1956) yang legendaris itu.

²⁷ Joseph Stiglitz, *Economy Growth and Education Policy*, Jakarta: Kompas tanggal 15 Desember 2004.

Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di sisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil.

Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin.

C. Penutup

Pendidikan Islam dapat dipandang sebagai proses produksi yang berfungsi mengolah masukan (*input*) dengan menggunakan berbagai sumberdaya untuk menghasilkan keluaran, berupa output dan outcomes. Keluaran pendidikan Islam tersebut dapat bernilai ekonomis dan non-ekonomis. Untuk itu nilai ekonomis pendidikan perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan agar sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pendidikan Islam sebagai investasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan neto atau *rate of return* yang lebih besar di masa yang akan datang. Biaya pendidikan Islam dalam jenis pendidikan ini dipandang sebagai jumlah uang yang dibelikan untuk memperoleh atau ditanamkan dalam

sejumlah modal manusia (*human capital*) yang dapat memperbesar kemampuan ekonomi di masa yang akan datang. Pendidikan Islam sebagai investasi didasarkan atas anggapan bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital (modal) sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Melalui investasi dirinya seseorang dapat memperluas alternatif untuk kegiatan-kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang.

Nilai ekonomi pendidikan Islam terletak pada dalil-dalil bahwa masyarakat meningkatkan kemampuannya sebagai produsen dan konsumen dengan berinvestasi sendiri dan pendidikan Islam merupakan investasi terbesar dalam pengembangan modal manusia. Dalil ini menyatakan bahwa kebanyakan kemampuan ekonomi masyarakat tidak ditetapkan pada saat lahir atau pada saat kanak-kanak ketika hendak memasuki sekolah atau madrasah. Kemampuan-kemampuan yang diperoleh ini merupakan segalanya namun disepelekan. Kemampuan itu penting untuk merubah secara radikal ukuran-ukuran yang biasa dari sejumlah tabungan dan pemupukan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker G.S. 1993. *Human Capital, A theoritical and Empirical Analysis with Speccial reference to Education*. Chicago: University of Chicago P ress
- Chapman, D. 2002. *Management and Efficiency in Education. Goals and Strategies*. Manila-Hongkong: Asian Development Bank and Comparative Education Research Center, The University of Hongkong.
- Cheng, Yin Cheong. 1996. *School Effectiveness and School Based Management: A Mechanism for Development*, Washington D.C: The Palmer Press,

Cohn, E. 1979. *The Economics of Education*. Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company.

Cohn. Elchanan, 1979. *The Economics Of Education*. Ballinger Publishing

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pengkajian 13 Indikator Pendidikan*. Jakarta: PDIP Balitbang Depdiknas.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia

Engkoswara. 2002. *Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Pembudayaan*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga

Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Rosda. Bandung

Fitz-enz, J. 2000. *The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance*. New York: American Management Association (AMACOM).

Jac Fitz-enz, 2000. *The ROI of Human Capital, Measuring the Economic Value of Employee Performance*, New York: Amacom.

Johnes, G. 1993. *The Economics of Education*. London: The McMillan Press Ltd.

Johns, R. L., dan Morphet, E. L. 1975. *The Economics & Financing of Education. A System Approach* (third ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.

Johnson, S.L., dan Rush, S.C. (eds). 1995. *Reinventing the University. Managing and Financing Institutions of Higher Education*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kompas, 24 Mei 2004.

Kompas, 15 Desember 2004. Joseph Stiglitz, 2004. *Economy Growth and Education Policy*, Jakarta.

Leslie, L.L., dan Brinkman, P.T., 1993. *The Economic Value of Higher Education*. Phoenix: The Oryx Press.

Muhibbin Syah. 2003. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soegarda Poerbakwatja. 1981. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Psacharopoulos, G. (ed). 1987. *Economics of Education. Research and Studies*. New York: Pergamon Press.

Raymond Mc. Leod. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Reza Mudyahardjo. 2001. *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rosda.

Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryadi. Ace. 1999. *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sutisna, O. 1989. *Administrasi Pendidikan. Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.

Tim Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tim. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.